



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDLATUL ATFHAL  
Nomor : B-3244/Kk.13.35/2/PP.00.4/11/2016

Nama Madrasah	: RAUDLATUL ATFHAL AL-IHSAN
Alamat	: JL SIDODADI GG VII NO 25 RT 36 RW 06
Desa/Kelurahan	: KEBONAGUNG
Kecamatan	: PAKISAJI
Kabupaten/Kota	: MALANG
Provinsi	: JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN AL IHSAN
Akte Notaris Penyelenggara	: No. 8, H. CHUSEN BISRI, SH
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-7890.AHA.01.04 TAHUN 1999
Tanggal Pendirian	: 25 OKTOBER 1985

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

101235070172

Berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijin Operasional yang dikeluarkan oleh  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Malang, 29 Nopember 2016

Nopala





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 401 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL  
RAUDLATUL ATHFAL AL-IHSAN KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang :
- a Bawa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah/Raudlatul Athfah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah/Raudlatul Athfah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b Bawa masa berlaku izin operasional / pendirian Madrasah/Raudlatul Athfah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c Bawa Madrasah/Raudlatul Athfah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah/Raudlatul Athfah;
  - d Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang tentang perpanjangan Ijin Pendirian/ Operasional Raudlatul Athfah AL-IHSAN Kabupaten Malang ;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
- 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1382);
- 7 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN AL IHSAN Nomor : 08/AL-IHSAN/I/2016 Tanggal 15 JANUARI 2016;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-IHSAN KABUPATEN MALANG
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah/Raudlatul Athfal kepada madrasah/Raudlatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah/Raudlatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Nopember 2016  
Kepala





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KAB MALANG

NOMOR : 401 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL  
RAUDLATUL ATFHAL AL-IHSAN KABUPATEN  
MALANG

IDENTITAS RAUDLATUL ATFHAL YANG DIBERIKAN  
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	NAMA MADRASAH/RAUDLATUL ATFHAL	RA AL-IHSAN
2	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RAUDLATUL ATFHAL	101235070172
3	ALAMAT MADRASAH/RAUDLATUL ATFHAL	JL. SIDODADI GG VII NO 25 RT 36 RW 06 DESA KEBONAGUNG KECAMATAN PAKISAJI
4	NAMA ORGANISASI PENYELENGGARA	YAYASAN AL IHSAN
5	AKTE NOTARIS ORGANISASI PENYELENGGARA	NO. 8, H. CHUSEN BISRI, SH
6	PENGESAHAN AKTE NOTARIS ORGANISASI PENYELENGGARA	AHU-7890.AHA.01.04 TAHUN 1999

